

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 15 No. 3 Desember 2022 Hal. 283 - 422

**“BEST INTEREST
OF THE CHILD”**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur: 1. Juma'in, S.E.
2. Jonsi Afriantara, S.H., M.H.

Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat: 1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer: 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“BEST INTEREST OF THE CHILD”

B*est interest of the child* atau asas/prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hak anak, yang bersumber dari Pasal 3 Konvensi PBB tentang hak anak, yang mengatakan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Menilai kepentingan terbaik seorang anak berarti mengevaluasi dan menyeimbangkan semua elemen yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu untuk individu anak atau kelompok anak tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak mendorong supaya dalam setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah menyangkut dengan anak diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam Jurnal Yudisial edisi terakhir di tahun 2022 ini, ada lima tulisan yang setidaknya membahas atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan anak. Tulisan pertama membahas tentang harta dalam nikah siri. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa harta dalam pernikahan siri rentan bermasalah dalam penggunaannya, karena pernikahan siri tidak diakui oleh negara. Hal yang menjadi momok bagi para istri dalam pernikahan siri, karena meskipun diakui secara agama, anak hasil nikah siri dianggap bukan anak resmi yang memiliki kedudukan hukum.

Tulisan kedua membahas tentang pembatalan akta wasiat. Wasiat menjadi isu penting dalam hubungan keluarga, karena akan memosisikan anak sebagai ahli waris. Tidak sedikit terjadi kasus penelantaran anak oleh pihak keluarga setelah orang tua anak tersebut meninggal dunia. Selurus dengan kedua tulisan sebelumnya, tulisan ketiga membahas tentang harta bersama dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak. Hakim di sini melakukan terobosan hukum yang baik, dengan menunda pembagian harta bersama hingga anak beranjak dewasa, untuk melindungi hak anak tumbuh kembang sebagaimana mestinya.

Tulisan keempat membahas tentang pelecehan seksual dengan korban anak. Dalam tulisan disebutkan bahwa selain pidana penjara, pelaku dikenakan denda dan restitusi. Hal ini sangat tepat dilakukan, karena korban pelecehan seksual selalu mengalami trauma, dan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengobati permasalahan mental yang dialami oleh korban. Tulisan kelima mengenai diversifikasi pelaku anak dan dewasa

dan tindak pidana. Pemisahan pidana anak dan dewasa memang sudah semestinya, karena anak belum matang cara berfikirnya dan mudah dipengaruhi melakukan tindakan kriminal. Dua tulisan terakhir membahas terkait kewenangan Mahkamah Agung, yang menarik untuk dibaca karena menyinggung tentang hal yang jarang dibahas sebelumnya.

Dari tulisan-tulisan di Jurnal Yudisial edisi ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan *point of view* yang baru bagi para pembaca terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait permasalahan anak. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk menjadi negara yang mampu memberi ruang aman dan kesejahteraan bagi anak. Legislatur dalam membuat peraturan, dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan selalu dapat menerapkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Ada satu pernyataan yang relevan dari John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika tentang berharganya peran anak-anak di masa depan, bahwa “anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia dan harapan terbaik untuk masa depan.” Anak adalah karunia terindah yang dititipkan Tuhan, juga masa depan kita, masa depan Indonesia, dan masa depan peradaban dunia.

Selamat membaca.

PEMIDANAAN TERHADAP PENGGELAPAN HARTA DARI NIKAH SIRI	283 - 299
Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag	
Mansari	
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh	
Haspan Yusuf Ritonga, Kantor Hukum Ritonga & Partner	
Rahmad Hidayat	
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh	
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI AKTA WASIAT YANG MEMBATALKAN WASIAT SEBELUMNYA	301 - 316
Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE	
Elisabeth Nurhaini Butarbutar	
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA	317 - 335
Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019	
Deni Kamaludin Yusup & Fahadil Amin Al Hasan	
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung	
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA	337 - 359
Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg	
Imron Rosyadi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya	
Syamsul Fatoni, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	
PENERAPAN DIVERSI ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA	361 - 383
Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap	
Fuad, Aida Dewi, Fifink Praiseda Alviolita	
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta	
<i>JUDICIAL RESTRAINT</i> DALAM PENGUJIAN KEWENANGAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> DI MAHKAMAH AGUNG	385 - 403
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 85/PUU-XVI/2018 dan Nomor 30/PUU-XIII/2015	

Syaifullahil Maslul
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

JUAL BELIASET PERSEROAN TERBATAS 405 - 422

Kajian Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021

Yati Nurhayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 15 No. 3 Desember 2022

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Mansari, Ritonga HY, & Hidayat R (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh – Kantor Hukum Ritonga & Partner)

Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta dari Nikah Siri

Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag

Jurnal Yudisial 2022 15(3), 283-299

Nikah siri seringkali menimbulkan konsekuensi terhadap harta bersama. Fakta empiris menunjukkan persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan berakhir dengan pemidanaan. Melalui Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa karena menggadaikan harta yang diperoleh dari perkawinan kepada pihak lain, padahal perkawinan tersebut tidak dicatat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengapa majelis hakim menghukum suami yang menggelapkan harta dari nikah siri dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Perkawinan, KUHP, Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah dikarenakan hakim menilai mobil yang dibawakan oleh terdakwa dibeli selama masih adanya ikatan perkawinan dengan saksi korban dan tindak pidana tersebut dilakukan setelah saksi korban dan terdakwa menjatuhkan talak terhadap saksi korban. Secara yuridis, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat dalam perspektif ilmu hukum, karena satu unit mobil yang dibawakan oleh terdakwa belum

diketahui secara pasti bagian dari terdakwa maupun saksi korban serta tidak ada perlindungan hukum dari negara terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak dicatat. Suami maupun istri dapat saja bertindak terhadap harta yang diperoleh dari nikah siri karena tidak adanya batasan penggunaannya dari undang-undang. Sebaliknya, undang-undang hanya membatasi bagi pasangan suami istri menggunakan harta yang diperoleh dari perkawinan tercatat tanpa adanya persetujuan bersama.

(Mansari, Haspan Yusuf Ritonga, & Rahmad Hidayat)

Kata kunci: harta bersama; pemidanaan; nikah siri; penggelapan.

Butarbutar EN (Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan)

Pertimbangan Hakim dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya

Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE

Jurnal Yudisial 2022 15(3), 301-316

Wasiat umum merupakan akta yang dibuat notaris tentang kehendak seseorang atas harta kekayaannya setelah meninggal yang dapat dicabut kembali. Penelitian dilakukan terhadap Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, untuk mengetahui penilaian hakim terhadap kekuatan wasiat umum yang membatalkan wasiat pewaris sebelumnya, dan pertimbangan hakim menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan wasiat umum. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis yang mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian hakim atas kekuatan wasiat umum sehingga dapat mencabut wasiat pewaris sebelumnya didasarkan pada kekuatan bukti sempurna yang melekat pada akta otentik, padahal wasiat pewaris sebelumnya juga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tanda tangan di dalamnya

<p>diakui atau tidak disangkal. Pertimbangan hakim menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan wasiat umum didasarkan pada formalitas pembuatan akta, yang dinilai sesuai dengan undang-undang sedangkan pejabat yang membuat hanya menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun demi keadilan, seharusnya, hakim memperhatikan kepentingan ahli waris lain yang kehilangan hak akibat pencabutan wasiat yang dibuat secara sah menurut hukum adat dan pejabat harus mempertimbangkan akibat hukumnya sebelum melakukan tugas dan kewenangannya.</p> <p style="text-align: right;">(Elisabeth Nurhaini Butarbutar)</p> <p>Kata kunci: penilaian; membatalkan; bukti sempurna; akta wasiat; kesalahan.</p>	<p>jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan <i>rechtsvinding</i> perihal waktu pembagian harta bersama, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dan menunda proses pembagian harta bersama hingga mereka beranjak dewasa. Maka, gugatan harta bersama yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang memberikan jaminan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas tempat tinggal layak. Putusan ini melahirkan kaidah hukum bahwa apabila gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.</p> <p style="text-align: right;">(Deni Kamaludin Yusup & Fahadil Amin Al Hasan)</p> <p>Kata kunci: harta bersama; gugatan; hak-hak anak; kepentingan terbaik anak.</p>
<p>Yusup DK & Al Hasan FA (Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung)</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama</p> <p>Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(3), 317-335</p> <p>Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dimulai sejak awal perkawinan hingga berakhirnya perkawinan. Proses pembagian harta bersama tersebut dilakukan sejak perkawinan berakhir, apakah disebabkan perceraian ataupun kematian salah satu pasangan. Aspek utama yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan sengketa harta bersama hanya terkait waktu perolehan harta tanpa aspek lain di luar harta, seperti aspek kepentingan terbaik untuk anak. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan harta bersama dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 yang juga mempertimbangkan aspek kepentingan anak. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif literer menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur lain terkait perkara harta bersama dikonjungsikan dengan putusan yang dibahas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018</p>	<p>Rosyadi I & Fatoni S (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya – Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)</p> <p>Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana</p> <p>Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(3), 337-359</p> <p>Sistem peradilan pidana harus mencerminkan nilai keadilan terhadap pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam perkara ini, tersangka sebagai pendidik telah melakukan kekerasan yaitu pemaksaan terhadap anak untuk bersetubuh dengannya. Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3) dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Rumusan masalahnya bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? Metode dalam penelitian ini adalah normatif di mana fokus kajiannya adalah data sekunder sehingga terlihat pertimbangan</p>

<p>hakim dalam putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga hak tersebut tidak absolut (<i>non-derogable rights</i>). Pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana, sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP. Diperlukan sinkronisasi di antara subsistem peradilan pidana khususnya pengadilan, didukung lembaga terkait sehingga pemidanaannya mencerminkan nilai keadilan sesuai ajaran hukum dan moral untuk kepentingan pelaku, korban serta masyarakat.</p> <p>(Imron Rosyadi & Syamsul Fatoni)</p> <p>Kata kunci: kekerasan; seksual; pemidanaan; sistem peradilan pidana.</p>	<p>adalah metode pendekatan hukum normatif. Metode ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi penerapan diversifikasi anak atas perbuatan pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa, dan bagaimana penerapan diversifikasi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap telah mencapai kesepakatan diversifikasi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Diversifikasi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap. Terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, penyelesaiannya akan selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kasus yang penyelesaiannya melalui upaya diversifikasi, mengacu pada Pedoman Penetapan Diversifikasi yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2014.</p> <p>(Fuad, Aida Dewi, & Fifink Praiseda Alviolita)</p> <p>Kata kunci: diversifikasi; tindak pidana; anak; pencurian.</p>
<p>Fuad, Dewi A., & Alviolita FP (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta)</p> <p>Penerapan Diversifikasi Anak atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa</p> <p>Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(3), 361-383</p> <p>Maraknya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh anak bukanlah hal baru. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak kian hari bertambah, bahkan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Salah satu hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah bahwa mereka dapat memperoleh diversifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menarik garis besar pemahaman terkait penerapan diversifikasi pada anak terhadap perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pelaku anak bersama dengan pelaku orang dewasa. Penelitian ini melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini</p>	<p>Maslul S (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta)</p> <p><i>Judicial Restraint</i> dalam Pengujian Kewenangan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Agung</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018 dan Nomor 30/PUU-XIII/2015</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(3), 385-403</p> <p>Penelitian ini menyoal penerapan asas <i>judicial restraint</i> oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerapkan asas <i>judicial restraint</i> dalam Putusan Nomor 85/PUU-XVI/2018 dan Nomor 30/PUU-XIII/2015. <i>Judicial restraint</i> adalah prinsip yang mengharuskan pengadilan atau mahkamah untuk menahan diri untuk membuat putusan yang bersinggungan dengan kewenangan legislatif. Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XVI/2018 dan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip ini dengan alasan bahwa Pasal 31A ayat (4)</p>

<p>Undang-Undang Mahkamah Agung adalah <i>open legal policy</i> dan pasal yang sedang diuji tidak memiliki persoalan konstitusional norma. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada <i>judicial restraint</i> pada putusan a quo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan (<i>statuta approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conseptual approach</i>). Hasil dari penelitian ini adalah munculnya implikasi terhadap pencari keadilan. <i>Pertama</i>, hilangnya kesempatan para pihak untuk menyampaikan pendapat selama proses <i>judicial review</i>. Hal ini disebabkan tertutupnya proses persidangan dan tidak mengakomodir asas <i>audi et alteram partem</i>. <i>Kedua</i>, hilangnya kepastian hukum di mana para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pengadilan dijalankan. <i>Ketiga</i>, perlakuan yang tidak sama di depan hukum. Perbedaan ini muncul seiring dengan pembedaan keikutsertaan dan keterlibatan para pihak dalam <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Proses yang tertutup tidak memberikan kesempatan untuk keikutsertaan para pihak dan tidak terbuka untuk umum.</p> <p style="text-align: right;">(Syaifullahil Maslul)</p> <p>Kata kunci: <i>judicial review; open legal policy; judicial restraint</i>.</p>	<p>perundang-undangan disertai dengan studi Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan majelis hakim dalam perkara jual beli aset perseroan dalam Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 yang menguatkan putusan banding dan putusan pengadilan negeri dirasa kurang tepat karena hanya mendasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara di mana jual beli aset PT TH yang seharusnya melihat juga pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hakim juga dalam putusannya mengabaikan fakta bawah jual beli aset perusahaan dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar sebagai direktur utama yang artinya dia tidak berhak mewakili PT TH. Pertimbangan Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 menyebutkan bahwa perjanjian ini sah karena telah memenuhi unsur kesepakatan karena tidak adanya unsur paksaan (<i>dwang</i>); penipuan (<i>bedrog</i>); dan kesilapan (<i>dwaling</i>) saja atau karena telah terjadinya sebagian pembayaran. Akan tetapi, argumentasi hakim tanpa meneliti dan memperhatikan dengan cermat syarat sahnya perjanjian lainnya yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang tertuang dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan dokumen pendukung lainnya..</p> <p style="text-align: right;">(Yati Nurhayati)</p> <p>Kata kunci: perseroan terbatas; perusahaan; jual beli.</p>
<p>Yati N (Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB)</p> <p>Jual Beli Aset Perseroan Terbatas</p> <p>Kajian Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(3), 405-422</p> <p>Permasalahan yang terjadi dalam artikel ini berkaitan dengan ketidaksesuaian pertimbangan hukum Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 atas terjadinya jual beli aset perusahaan PT TH berupa sebidang tanah dengan luas lahan 3.023 m² di Desa Kalirungkut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, di mana permasalahan dikaji menggunakan bahan kepustakaan dan kajian</p>	

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Mansari, Ritonga HY, & Hidayat R (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh – Kantor Hukum Ritonga & Partner)

Criminalization Against Assets Embezzlement from Siri Marriage

An Analysis of Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2022 15(3), 283-299

Siri marriages (unregistered marriages) often have consequences for a joint asset. Empirical facts show that the problems caused are related to a joint asset obtained from an ended marriage with criminalization. Through Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, the panel of judges sentenced the defendant to one year's imprisonment for pawning an asset acquired during marriage to another party, even though the marriage was unregistered. The research aims to analyze why the panel of judges sentenced the husband because he embezzled the asset from the siri marriage and how the juridical review of the sentencing. This research used the juridic normative method. Primary legal materials are the Marriage Law, Criminal Code, Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from books, journals, and research results related to this topic. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the judge's consideration of imposing a sentence on the defendant who committed the embezzlement was because the judge assessed that the car brought by the defendant was purchased as long as there was still a marital bond with the victim-witness. After the victim-witness and the defendant had divorced then, the crime was committed. Juridically, the sentence imposed on the defendant was inaccurate in legal perspective because the one unit of the car brought by the defendant had not yet been identified as belonging to the defendant or the victim-witness, and there was no legal protection from the state for

an asset obtained from an unregistered marriage. Husbands and wives may act on assets obtained through siri marriage because there are no restrictions on its use in the law. On the other hand, the law only restricts spouses from using assets acquired during a registered marriage without mutual consent.

(Mansari, Haspan Yusuf Ritonga, & Rahmad Hidayat)

Keywords: joint assets; criminalisation; siri marriage; embezzlement.

Butarbutar EN (Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan)

Judge Considerations in Assessing a Deed of Will That Cancels a Previous Will

An Analysis of Decision Number 99/PDT.G/2020/PN BALIGE (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2022 15(3), 301-316

A general testament is a deed made by a notary about a person's will over his/her property after death which can be revoked. Against Decision Number 99/PDT.G/2020/PN BALIGE, research was conducted by the author to determine the judge's assessment of the general testament strength that canceled the previous testator's will and the judge's consideration that stated there was no mistake in making the general testament. The method used is normative juridical, which examines legal materials related to the problem. The results showed that the judge's assessment of the general testament's strength that could revoke the testator's last will was based on the strength of perfect evidence attached to the authentic deed, even though the testator last will also had excellent evidentiary strength because the signature in it was acknowledged or not denied. The judge's consideration stated that there was no mistake in making the general testament based on the formality of doing the deed, which was

<p>considered compatible with the law, while the official who made it only carried out his duties and authority. However, in favor of justice, judges should pay attention to other heir's interests who have lost their rights because of the revocation of a will that is legal according to customary law, and the officials should consider the legal consequences before performing their duties and authorities.</p> <p style="text-align: right;">(Elisabeth Nurhaini Butarbutar)</p> <p>Keywords: judgment; canceling; perfect evidence; deed of will, mistake.</p>	<p>unacceptable. This was one of the decisions that ensured the child's right to live in safety. This decision put forward the rule of law that if a marital property lawsuit has the potential to hinder the best interests of the child, it is declared unacceptable.</p> <p style="text-align: right;">(Deni Kamaludin Yusup & Fahadil Amin Al Hasan)</p> <p>Keywords: marital property; lawsuit; children's rights; best interest of the child.</p>
<p>Yusup DK & Al Hasan FA (Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung)</p> <p>Legal Protection of Children's Rights in Marital Property Disputes</p> <p>An Analysis of Decision Number 159 K/Ag/2018 jo. Decision Number 6 PK/Ag/2019 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2022 15(3), 317-335</p> <p>Marital property refers to the property that a couple acquires during the course of marriage. The process of dividing the joint assets is carried out after the marriage is terminated, whether due to divorce or one of the spouses' death. The main aspects considered in the examination of marital property disputes are only related to the time of acquiring the assets, without external aspects such as the best interests of the child. This is in contrast to the examination of joint assets in Decision Number 159 K/Ag/2018 and Decision Number 6 PK/Ag/2019, which takes into account aspects of the child's interests. This analysis is a qualitative literary research approach, reviewing and exploring documents relevant to the decision in question. This study concluded that the panel of judges in Decision Number 159 K/Ag/2018 jo. Decision Number 6 PK/Ag/2019 has done a progressive ijtihad by carrying out rechtsvinding regarding the timing of sharing joint assets. The judge considers the best interests of the child by delaying the distribution of joint assets until they reach adulthood. Therefore, the marital property lawsuit has to be declared</p>	<p>Rosyadi I & Fatoni S (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya – Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)</p> <p>Criminalising Perpetrators of Sexual Violence from the Perspective of the Criminal Justice System</p> <p>An Analysis of Decison Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2022 15(3), 337-359</p> <p>The criminal justice system must reflect the value of justice in punishing perpetrators of sexual violence. In this case, the suspect, as an educator, had committed violence by forcing the child to have intercourse with him. The judge's decision stated that the defendant was guilty of committing sexual violence according to Article 81 paragraphs (1), (3), and (5) in conjunction with Article 76D of Law Number 17 of 2016 on the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. The formulation of the problem is: how is the punishment of sexual violence perpetrators in the criminal justice system associated with Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? The method in this research is normative, where the focus of the study is secondary data so that the judge's consideration in his decision can be seen. The results showed that the punishment for defendants in sexual violence is the death penalty. And other disciplines, such as fines, restitution, and so on, are not contrary to human rights compatible with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28J paragraph (2) and Article 28I paragraph (1), so these rights are not absolute (non-derogable rights). Punishment</p>

<p>for the perpetrators must be applied even though, so far, it has not been able to provide a deterrent and comprehensive effect in tackling criminal offenses. At the same time, chemical castration and restitution payments are left to the defendant contrary to Article 67 of the Criminal Code. Synchronization between criminal justice subsystems, especially the courts, supported by related institutions is needed so that the punishment reflects the value of justice compatible with legal and moral teachings for the benefit of the perpetrator, victim, and society.</p> <p>(Imron Rosyadi & Syamsul Fatoni)</p> <p>Keywords: violence; sexual; criminalization/punishment; criminal justice system.</p>	<p>Determination Number 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap, a diversion agreement has been reached. Resolutions for children with legal problems always refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, juvenile criminal cases resolved through diversion refer to the Guidelines for Determining Diversion, that is Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014.</p> <p>(Fuad, Aida Dewi, & Fifink Praiseda Alviolita)</p> <p>Keywords: diversion; crime; juvenile; theft.</p>
<p>Fuad, Dewi A., & Alviolita FP (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta)</p> <p>Juvenile Diversion in the Crime of Theft Conjoint Child and Adult Offenders</p> <p>An Analysis of Decision Number 307/Pid.B/2015/PN.Rap (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2022 15(3), 361-383</p> <p>The rampant juvenile crime of theft is nothing new. The cases often occurred and the number was increasing. Nonetheless, the child committing the crime of theft is entitled to obtain diversion. The objective of this research is to identify the application of juvenile diversion to the children who commit criminal theft along with adult offenders. This research examines the decisions of the Rantauprapat District Court, North Sumatra. The research method used in this analysis is a normative legal approach. This method examines the prevailing laws and regulations, or certain law applied to particular legal issues. The formulation of the problem in this analysis is the background of the implementation of child diversion for criminal acts of theft committed with adults; and the mechanism for implementing child diversion for the crime of theft committed with adult offenders. The results of this study indicate that based on Decision Number 307/Pid.B/2015/PN.Rap and as stated in the Diversion</p>	<p>Maslul S (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta)</p> <p>Judicial Restraint in Examining the Supreme Court Authority to Judicial Review</p> <p>An Analysis of Constitution Court Decision Number 85/PUU-XVI/2018 and Number 30/PUU-XIII/2015 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2022 15(3), 385-403</p> <p>This research examines the issue of the judicial restraint principle that the Constitutional Court applied in Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XVI/2018 and Number 30/PUU-XIII/2015. This principle requires a court or tribunal to refrain from making decisions that intersect with legislative authority. In these decisions, the Constitutional Court applied it as Article 31A, paragraph (4) of the Supreme Court Law is an open legal policy and the article reviewed did not have any constitutional norms issues. This research is a normative legal study focusing on judicial restraint on a quo decisions using a statute and conceptual approach. The results made a few implications for justice seekers. Firstly, the parties lose the opportunity to express their opinion during the judicial review process due to the closed trial process, which does not accommodate the principle of audi et alteram partem. Secondly, there was no legal certainty given that the parties were unable to monitor the court process. Thirdly, there was no equality before the law. The disparity arised corresponding to the differences in the participation and involvement of parties in</p>

<p>judicial reviews both at the Constitutional Court and the Supreme Court. In a closed process, there is no opportunity for the participation of parties, and it is closed to the general public.</p> <p style="text-align: right;">(Syaifullahil Maslul)</p> <p>Keywords: judicial review; open legal policy; judicial restraint.</p>	<p>of Decision Number 778 K/Pdt/2021 states that this agreement is valid because it fulfills the elements of an agreement due to the absence of coercion (dwang), fraud (bedrog), and mistake (dwaling) or because a partial payment has occurred. However, the judge's argument is without scrutinizing and paying attention to the other legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, which is contained in the sale and purchase agreement for land and building deed and other supporting documents.</p> <p style="text-align: right;">(Yati Nurhayati)</p> <p>Keywords: limited liability company; company; sale and purchase.</p>
<p>Yati N (Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB)</p> <p>Sale and Purchase of Limited Liability Company Assets</p> <p>An Analysis of Decision Number 778 K/Pdt/2021 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2022 15(3), 405-422</p> <p>The problem that occurs in this article relates to the discrepancy in the legal considerations of the Decision Number 778 K/Pdt/2021 on the sale and purchase of the company PT TH assets in the form of a plot of land with a land area 3.023 m² in Kalirungkut Village. This research aims to determine whether or not the judge's consideration at the cassation level in Decision Number 778 K/Pdt/2021. The method used in this research is the normative method, where the problem is analyzed using literature and statutory study accompanied by a study of the Decision Number 778 K/Pdt/2021. The results of this research found that the judge's consideration in the panel of judges' decision in the case of the sale and purchase of company assets in Decision Number 778 K/Pdt/2021, which strengthened the appeal decision and the district court's decision was deemed inappropriate because it only based its consideration on the provisions of Article 1320 of the Civil Code where the sale and purchase of PT TH asset should also look at the provisions of the Company Law stipulated in Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The judge also ignored that the sale and purchase of the company's assets were carried out by a person who was not registered as the managing director, meaning that he had no right to represent PT TH. Consideration</p>	